



Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Langsa

Sri Rahayu Aprillia^{1*}, Citra Uli Situmorang², Puti Andiny³, Safuridar⁴

¹⁻⁴ Ekonomi Pembangunan, Universitas Samudera, Indonesia

Email : srahyuaprilialia@gmail.com¹, citrasisitumorang04@gmail.com²

*Penulis Korespondensi: srahyuaprilialia@gmail.com

Abstract. This study aims to analyze the influence of Locally Generated Revenue (PAD), Transfer Funds, and Capital Expenditures on the Human Development Index (HDI) in Langsa City for the period 2013–2025. The research method used is a quantitative approach with multiple linear regression analysis using the SPSS version 29 application. The results of the study indicate that partially, the PAD and Capital Expenditures variables have a significant effect on the HDI, while Transfer Funds have no significant effect. Simultaneously, PAD, Transfer Funds, and Capital Expenditures have a significant effect on the HDI. The coefficient of determination (R^2) value of 0.927 indicates that 92.7% of the variation in the HDI can be explained by these three fiscal variables, while the remaining 7.3% is influenced by other factors outside the model. This finding confirms that improving the quality of human development is not only determined by the size of the regional budget, but also by the effectiveness of management and the accuracy of budget allocation in sectors that have a direct impact on human development. Therefore, local governments need to prioritize sectors that contribute to improving the quality of education, health, and basic infrastructure, which are the main factors in improving the HDI.

Keywords: Capital Expenditure, HDI Variations, Human Development Index, Local Own-Source Revenue, Transfer Funds.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Langsa periode 2013–2025. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda menggunakan aplikasi SPSS versi 29. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, variabel PAD dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap IPM, sedangkan Dana Transfer tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, PAD, Dana Transfer, dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap IPM. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,927 menunjukkan bahwa 92,7% variasi IPM dapat dijelaskan oleh ketiga variabel fiskal tersebut, sementara sisanya sebesar 7,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran daerah, tetapi juga oleh efektivitas pengelolaan dan ketepatan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap pembangunan manusia. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memprioritaskan sektor-sektor yang berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, yang merupakan faktor utama dalam meningkatkan IPM.

Kata kunci: Belanja Modal, Dana Transfer, Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Asli Daerah, Variasi IPM.

1. LATAR BELAKANG

Kualitas pelayanan publik menjadi tolok ukur efektivitas pemerintahan daerah dalam melayani kebutuhan warganya. Pemerintah daerah berfungsi sebagai pelaksana langsung urusan pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut memberi kewenangan luas kepada daerah untuk mengatur urusan keuangan sendiri agar program pembangunan sesuai dengan kondisi lokal. Pengelolaan keuangan daerah yang efisien memperlihatkan kemampuan daerah mencapai kemandirian

fiskal tanpa ketergantungan tinggi terhadap pemerintah pusat. Dalam kerangka desentralisasi, kinerja ekonomi daerah dinilai dari tiga variabel, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, dan Belanja Modal. Ketiganya berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Analisis empiris atas ketiga variabel tersebut memberikan gambaran sejauh mana kebijakan fiskal daerah efektif dalam mendorong pembangunan manusia. Kota Langsa menjadi studi menarik karena mengalami pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif dalam periode lima tahun terakhir.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri. Berdasarkan Tabel 1, PAD Kota Langsa selama periode 2013–2024 menunjukkan pola yang berfluktuasi namun cenderung meningkat. Pada awal periode, PAD tercatat sebesar Rp57,59 miliar pada tahun 2013 dan mengalami peningkatan signifikan hingga Rp110,35 miliar pada tahun 2015 dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 59,76 persen. Setelah itu, laju pertumbuhan PAD relatif melambat dan bahkan mengalami kontraksi pada beberapa tahun, seperti tahun 2017, 2019, dan penurunan cukup tajam pada tahun 2021 sebesar –15,39 persen. Namun demikian, sejak tahun 2022 PAD kembali menunjukkan kinerja yang positif dengan pertumbuhan yang kuat, mencapai 34 persen pada tahun 2022 dan terus meningkat hingga mencapai Rp203,20 miliar pada tahun 2024. Dinamika tersebut mengindikasikan adanya perbaikan dalam upaya penggalian sumber-sumber pendapatan daerah melalui pajak, retribusi, dan pengelolaan aset daerah. Meskipun demikian, fluktuasi yang terjadi menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih belum stabil dan relatif terbatas dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga ketergantungan fiskal daerah masih menjadi tantangan dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah.

Tabel 1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa Tahun 2020–2024.

Tahun	Nilai	Pertumbuhan(%)
2013	Rp57.587.026.529	–
2014	Rp69.070.631.087	19,94
2015	Rp110.346.992.330	59,76
2016	Rp121.369.467.375	9,99
2017	Rp120.138.956.032	-1,01
2018	Rp121.358.576.034	1,02
2019	Rp120.504.670.904	-0,7

2020	Rp129.027.902.889	7,07
2021	Rp109.168.077.449	-15,39
2022	Rp146.281.803.543	34
2023	Rp166.292.893.509	13,68
2024	Rp203.204.797.660	22,20

Sumber: BPS Kota Langsa, data diolah (2024)

Dana Transfer merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam struktur pendapatan daerah Kota Langsa dan berperan penting dalam menopang kapasitas fiskal daerah. Berdasarkan Tabel 2, Dana Transfer Kota Langsa selama periode 2013–2024 menunjukkan dinamika yang sangat fluktuatif. Pada awal periode, Dana Transfer meningkat secara moderat dari Rp445,93 miliar pada tahun 2013 menjadi Rp505,10 miliar pada tahun 2015. Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2016 dengan pertumbuhan sebesar 44,08 persen, yang mencerminkan peningkatan alokasi transfer dari pemerintah pusat. Namun, pada periode berikutnya Dana Transfer mengalami penurunan berturut-turut pada tahun 2017 dan 2018, sebelum kembali mengalami peningkatan pada tahun 2019. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2020, diikuti lonjakan yang sangat tajam pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 163,76 persen, terutama dipengaruhi oleh peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Setelah puncak tersebut, Dana Transfer kembali mengalami kontraksi signifikan pada tahun 2022 dan penurunan ringan pada tahun 2023, sebelum kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi Rp764,15 miliar dengan pertumbuhan sebesar 13,04 persen. Pola fluktuasi ini menunjukkan tingginya ketergantungan fiskal Kota Langsa terhadap kebijakan transfer pemerintah pusat serta ketidakstabilan alokasi anggaran daerah. Kondisi tersebut menegaskan bahwa peningkatan Dana Transfer belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kinerja pembangunan yang konsisten, sehingga diperlukan optimalisasi pemanfaatan dana transfer ke arah belanja yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Tabel 2 Perkembangan Dana Transfer Kota Langsa Tahun 2020–2024.

Tahun	Nilai	Pertumbuhan(%)
2013	Rp445.928.780.151	-
2014	Rp479.418.226.550	7,51
2015	Rp505.098.308.709	5,36
2016	Rp727.738.311.990	44,08
2017	Rp677.192.132.793	-6,95
2018	Rp593.621.554.571	-12,34

2019	Rp617.782.373.399	4,07
2020	Rp520.941.107.171	-15,68
2021	Rp1.374.027.184.027	163,76
2022	Rp695.737.861.022	-49,37
2023	Rp675.984.413.162	-2,84
2024	Rp764.154.912.123	13,04

Sumber: BPS Kota Langsa, data diolah (2024)

Belanja Modal mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk investasi publik yang bersifat jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur, sarana pendidikan, kesehatan, serta fasilitas administrasi pemerintahan. Berdasarkan Tabel 3, perkembangan Belanja Modal Kota Langsa selama periode 2013–2024 menunjukkan pola yang sangat fluktuatif. Pada periode awal, Belanja Modal mengalami peningkatan signifikan dari Rp57,59 miliar pada tahun 2013 menjadi Rp333,30 miliar pada tahun 2017, dengan lonjakan tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 166,78 persen. Namun, setelah mencapai puncaknya, Belanja Modal mengalami penurunan tajam pada tahun 2018 sebesar –40,42 persen dan cenderung melemah pada periode berikutnya. Penurunan berlanjut hingga tahun 2020, meskipun sempat mengalami peningkatan moderat pada tahun 2021 sebesar 11,44 persen. Kontraksi kembali terjadi pada tahun 2022 dan mencapai penurunan terdalam pada tahun 2023 sebesar –47,87 persen, yang mencerminkan rendahnya prioritas alokasi anggaran terhadap pembentukan aset jangka panjang. Pada tahun 2024, Belanja Modal kembali mengalami pemulihan dengan pertumbuhan sebesar 51,53 persen, menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk mengarahkan kembali kebijakan fiskal ke sektor yang lebih produktif. Meskipun demikian, fluktuasi yang tajam dalam Belanja Modal berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik dan memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah apabila tidak dikelola secara konsisten dan berkelanjutan.

Tabel 3 Perkembangan Belanja Modal Kota Langsa Tahun 2020–2024.

Tahun	Nilai	Pertumbuhan(%)
2013	Rp57.587.026.529	–
2014	Rp69.070.631.087	19,94
2015	Rp110.346.992.330	59,76
2016	Rp294.379.982.765	166,78
2017	Rp333.296.714.479	13,22
2018	Rp198.592.250.991	-40,42

2019	Rp198.592.250.991	0
2020	Rp165.435.999.583	-16,7
2021	Rp184.368.501.186	11,44
2022	Rp118.362.209.222	-35,8
2023	Rp61.698.263.625	-47,87
2024	Rp93.492.007.911	51,53

Sumber: BPS Kota Langsa, data diolah (2024)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai indikator komprehensif untuk menilai capaian pembangunan daerah melalui dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Berdasarkan Tabel 4, IPM Kota Langsa selama periode pengamatan menunjukkan tren meningkat secara konsisten. Nilai IPM tercatat sebesar 73,40 pada awal periode dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 80,96 pada akhir periode. Laju pertumbuhan IPM relatif stabil dengan kisaran pertumbuhan tahunan di bawah dua persen, kecuali pada satu periode yang menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 3,44 persen. Kondisi ini mengindikasikan adanya akselerasi capaian pembangunan manusia yang cukup kuat pada periode tersebut. Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan IPM mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam kualitas hidup masyarakat Kota Langsa. Meski demikian, peningkatan IPM yang relatif stabil tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan dinamika pendapatan dan belanja daerah yang cenderung berfluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa capaian pembangunan manusia tidak hanya ditentukan oleh besaran anggaran, tetapi juga oleh efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan publik.

Tabel 4 Perkembangan Belanja Modal Kota Langsa Tahun 2020–2024.

Tahun	Nilai	Pertumbuhan(%)
2013	Rp57.587.026.529	—
2014	Rp69.070.631.087	19,94
2015	Rp110.346.992.330	59,76
2016	Rp294.379.982.765	166,78
2017	Rp333.296.714.479	13,22
2018	Rp198.592.250.991	-40,42
2019	Rp198.592.250.991	0
2020	Rp165.435.999.583	-16,7
2021	Rp184.368.501.186	11,44
2022	Rp118.362.209.222	-35,8

2023	Rp61.698.263.625	-47,87
2024	Rp93.492.007.911	51,53

Sumber: BPS Kota Langsa, data diolah (2024)

Analisis keseluruhan menunjukkan korelasi positif antara peningkatan PAD dan IPM, meski fluktuasi Dana Transfer dan penurunan Belanja Modal menahan potensi peningkatan lebih besar. Ketergantungan fiskal terhadap dana pusat menurunkan efektivitas pengelolaan anggaran daerah. Sebagian besar alokasi masih terserap pada belanja rutin yang tidak berdampak langsung pada pembangunan manusia. Teori pengeluaran pemerintah menjelaskan bahwa peningkatan belanja modal mendorong produktivitas ekonomi dan memperluas akses publik terhadap fasilitas dasar. Sementara teori desentralisasi fiskal menegaskan bahwa kemandirian fiskal berperan dalam menyesuaikan kebijakan daerah dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menganalisis hubungan antara PAD, Dana Transfer, dan Belanja Modal terhadap IPM Kota Langsa untuk menilai efektivitas kebijakan fiskal daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah yang sah (Rooy & Budiarmo, 2015). Pendapatan Asli Daerah adalah indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat (Tolosang, 2018). Sebaliknya semakin rendah penerimaan PAD suatu daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri (Noerman Syah et al., 2019). Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk memberikan kekuasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (Rizal & Erpita, 2019). Adanya kata-kata “asli” dimaksudkan bahwa pendapatan tersebut benar-benar berasal dari sumber asli daerah, dengan kata lain bukan merupakan pemberian bantuan, hibah, penyertaan modal dan sebagainya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal satu ayat 18 dijelaskan bahwa, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh oleh sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan para pakar diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai sumber utama pendapatan daerah ditunjukan untuk pelaksanaan pembangunan pemerintah daerah.

Sebagai sumber utama pembiayaan pemda PAD yang dihasilkan dari berbagai sumber yaitu:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang (Manopo, 2015), yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggara pemda dan pembangunan daerah. Perubahan UU No. 18 Tahun 1997 menjadi UU No. 32 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah merupakan perintah UU No. Tahun 1999 yang meminta agar jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah disesuaikan dengan kewenangan yang diserahkan kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

2. Retribusi Daerah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (28) UU No. 34 Tahun 2000 dan PP No. Tahun 2001 retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau daerah. Dengan demikian retribusi merupakan pemasukan yang berasal dari usaha pemda untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat baik individu maupun badan atau koperasi dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai kas daerah (Elim & Ersita, 2016). Retribusi dapat digolongkan menjadi tiga yaitu, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atau penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta. Peran BUMD dalam peningkatan pendapatan asli daerah sangat dibutuhkan sekali dalam menggerakkan ekonomi. Kinerja dari BUMD dari sisi internal, harus mampu menjadi pemacu utama pertumbuhan dan

pengembangan ekonomi, sedangkan dari sisi eksternal BUMD dituntut untuk menarik investasi asing maupun domestic agar pertumbuhan ekonomi di daerah memberikan *multiplier effect* yang (Murib et al., 2016).

Pendapatan dari jenis ini sesuai peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah antara lain yaitu laba atas penyertaan modal pada BUMD, laba atas penyertaan modal pada perusahaan patungan/milik swasta (Murib et al., 2016).

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah jenis Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah terdiri dari:
 - a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
 - b) Jasa giro, pendapatan bunga. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah (Murib et al., 2016).

Dana Transfer

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa dana yang bersumber dari APBN dialokasikan kepada pemerintah daerah sebagai bantuan untuk membiayai kebutuhan daerah. Tujuannya agar pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah berjalan efektif. Dana ini disebut dana transfer atau dana perimbangan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, dana perimbangan terdiri atas beberapa komponen.

Dana Bagi Hasil merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Besarnya disesuaikan dengan porsi daerah penghasil. Dana ini terdiri atas beberapa bagian. Pertama, bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 90%, sedangkan pemerintah pusat menerima 10%. Kedua, bagian daerah dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 80%, sedangkan pusat menerima 20%. Ketiga, bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam di sektor kehutanan, pertambangan umum, dan perikanan sebesar 80%, sedangkan pusat 20%.

Dana Alokasi Umum berasal dari APBN dan diberikan kepada daerah agar keuangan antar daerah lebih merata. Penetapannya berdasarkan kriteria yang menekankan pemerataan dan keadilan. Rumus dan perhitungannya diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dana ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan mendukung pelayanan publik agar ketimpangan antar daerah berkurang.

Dana Alokasi Khusus dialokasikan dari APBN untuk daerah tertentu. Tujuannya membantu kegiatan operasional yang menjadi program prioritas daerah sesuai dengan prioritas nasional. Dana ini digunakan untuk membiayai kebutuhan fisik seperti sarana dan prasarana di bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, infrastruktur, pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup.

Dana Otonomi Khusus diberikan kepada daerah yang memiliki status otonomi khusus, seperti Papua, Papua Barat, dan Aceh. Dana ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus di wilayah tersebut. Besarannya dua persen dari plafon Dana Alokasi Umum nasional, dengan pembagian 80% untuk kabupaten atau kota dan 20% untuk provinsi. Penggunaannya meliputi pendidikan 30%, pengembangan ekonomi kerakyatan 25%, infrastruktur 20%, kesehatan 15%, dukungan lembaga keagamaan dan masyarakat adat 6%, perencanaan dan pengawasan 2%, serta pembiayaan prioritas 2%. Besar kecilnya Dana Otonomi Khusus bergantung pada kemampuan keuangan negara dan hasil kesepakatan antara pemerintah dan DPR.

Belanja Modal

Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan asset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh asset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan asset tetap lainnya atau juga dengan membeli. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas asset.

Belanja modal adalah kelompok belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah asset). Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang merupakan bagian dari klasifikasi belanja daerah yaitu kelompok belanja daerah menurut program dan kegiatan yang termasuk ke dalam kelompok belanja langsung dimana belanja modal digunakan untuk membiayai kegiatan investasi atau menambah set yang dilakukan oleh pemerintah (Mardiasmo, 2021a).

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (Kusuma, 2017).

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan kelompok belanja administrasi umum (Darwanis & Saputra, 2014). Belanja modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu (Rarun et al., 2019).

Menurut peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010, belanja modal adalah belanja pemerintah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dana akan menambah kekayaan atau asset daerah dan akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal dapat digunakan untuk memperoleh asset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah asset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana asset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang merupakan bagian dari klasifikasi belanja daerah menurut program dan kegiatan yang termasuk ke dalam kelompok belanja langsung, dimana belanja modal digunakan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya memperoleh asset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan (satu periode akuntansi), termasuk didalamnya pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas asset.

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut United Nations Development Programme (UNDP) adalah proses memperluas pilihan hidup bagi manusia. Pembangunan manusia tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan manusia untuk hidup sehat, berpendidikan, dan memiliki kesejahteraan yang layak. IPM digunakan untuk menilai tingkat kemajuan suatu wilayah serta untuk melihat sejauh mana kebijakan ekonomi mempengaruhi kualitas hidup penduduk.

Yuliani & Saragih (2014) menjelaskan bahwa IPM berfungsi sebagai alat pemantauan pembangunan manusia, terutama dalam menilai kualitas fisik dan sosial penduduk di suatu daerah. IPM dijadikan standar keberhasilan pembangunan yang komprehensif dan menjadi tolok ukur kemajuan suatu wilayah. Setiawan (2022) menambahkan bahwa IPM berperan

dalam memperkenalkan konsep pembangunan manusia sebagai pendekatan baru terhadap kesejahteraan serta menjadi alternatif pengganti Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita dalam mengukur tingkat pembangunan antarnegara dan antarwaktu.

Menurut Todaro dan Smith (2020), sumber daya manusia adalah modal dasar pembangunan nasional. Sumber daya alam dan modal fisik hanya berfungsi ketika dikelola oleh manusia yang berkualitas. Manusia bertindak sebagai penggerak pembangunan ekonomi, sosial, dan politik. Pembangunan akan berjalan dengan baik jika masyarakat memiliki tingkat kesehatan, pendidikan, dan daya beli yang tinggi. Ketiga indikator ini menjadi ukuran utama dalam IPM karena mencerminkan kualitas hidup masyarakat.

Wijanarko & Susanti (2023) menyatakan bahwa peningkatan kesehatan, pendidikan, dan daya beli akan meningkatkan kualitas hidup manusia. Kondisi sosial, geografis, dan ekonomi yang beragam membuat pendapatan tidak lagi menjadi ukuran tunggal dalam menilai kesejahteraan. IPM memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang keberhasilan pembangunan dan kualitas hidup masyarakat di suatu daerah.

UNDP mengukur IPM melalui tiga komponen, yaitu kesehatan, pendidikan, dan daya beli. Kesehatan diukur dengan angka harapan hidup sejak lahir yang mencerminkan rata-rata usia yang diharapkan dapat dicapai oleh penduduk. Semakin tinggi angka harapan hidup, semakin baik pula kondisi pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat (Sidabutar et al., 2020). Dalam ekonomi kesehatan, sumber daya dan pembiayaan dialokasikan untuk pelayanan yang efisien dan bermanfaat bagi individu dan masyarakat (Nadjib & Setiawan, 2020).

Pendidikan menjadi sarana penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Teori *Human Capital* menjelaskan bahwa pendidikan meningkatkan produktivitas dan efisiensi tenaga kerja sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi (Welch, 1975). Pendidikan formal dianggap sebagai investasi manusia yang bernilai tinggi. Dalam IPM, pendidikan diukur melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang menggambarkan kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan (Barro & Lee, 1996).

Daya beli menunjukkan kemampuan seseorang atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Indeks ini menggambarkan standar hidup yang diukur melalui pendapatan riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli. Ketimpangan pendapatan, inflasi, pertumbuhan penduduk, dan distribusi investasi menjadi faktor yang memengaruhi daya beli masyarakat (Paddu et al., 2024). Ranis & Stewart (2007) menegaskan bahwa pembangunan manusia dan ekonomi saling berkaitan. Peningkatan kualitas manusia melalui pendidikan dan kesehatan akan mendorong produktivitas, sementara peningkatan ekonomi yang inklusif akan memperkuat pembangunan manusia.

Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kemampuan daerah mengelola sumber pendapatan sendiri untuk membiayai kegiatan pembangunan. Menurut Ardiyanti dkk., (2022), PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta pendapatan sah lainnya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Teori fiscal capacity menjelaskan bahwa peningkatan PAD memperluas kemampuan daerah dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas. Pemerintah daerah dengan PAD tinggi mampu membiayai program pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur secara mandiri tanpa bergantung pada dana pusat. Kondisi ini meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tercermin dalam kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Musgrave (1957) dalam teori pengeluaran pemerintah menyatakan bahwa setiap kenaikan penerimaan daerah akan meningkatkan kapasitas belanja yang berdampak pada pembangunan manusia. Dengan pengelolaan PAD yang efektif, pemerintah dapat memperluas akses pendidikan, memperbaiki layanan kesehatan, dan memperkuat ekonomi lokal. Hubungan positif antara PAD dan IPM terbentuk melalui distribusi anggaran pada sektor produktif. Dengan demikian, semakin besar PAD, semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah meningkatkan IPM melalui investasi pada layanan dasar.

Hubungan Dana Transfer dengan Indeks Pembangunan Manusia

Dana Transfer berfungsi mengurangi ketimpangan fiskal antarwilayah dan menjamin ketersediaan layanan dasar bagi seluruh masyarakat. Menurut Mardiasmo (Mardiasmo, 2021b), transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada daerah terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Teori fiscal decentralization yang dikemukakan oleh Oates (1993) menjelaskan bahwa pemberian kewenangan dan pendanaan kepada daerah memungkinkan pemerintah lokal lebih efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dana Transfer membantu daerah dengan kapasitas fiskal rendah untuk melaksanakan program pembangunan manusia.

Ketika Dana Transfer dialokasikan untuk kegiatan produktif seperti pembangunan fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas guru, atau penyediaan infrastruktur publik, maka IPM akan meningkat. Sebaliknya, apabila dana tersebut lebih banyak digunakan untuk belanja rutin, dampaknya terhadap pembangunan manusia menjadi terbatas. Penelitian empiris yang dikemukakan oleh Mahmudi (2019) juga menunjukkan bahwa Dana Transfer memiliki pengaruh positif terhadap IPM apabila diarahkan pada sektor yang memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Hubungan ini memperlihatkan bahwa efektivitas pemanfaatan dana lebih menentukan dibandingkan besarnya.

Hubungan Belanja Modal dengan Indeks Pembangunan Manusia

Belanja Modal mencerminkan investasi pemerintah daerah dalam pembangunan aset jangka panjang. Teori public expenditure yang dikemukakan oleh Musgrave (1983) menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah untuk belanja modal menciptakan efek berganda terhadap ekonomi daerah. Infrastruktur yang baik menurunkan biaya produksi, mempercepat mobilitas, dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Dengan demikian, belanja modal berpengaruh terhadap dimensi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi yang membentuk IPM.

Pope dkk., (2024) menegaskan bahwa peningkatan proporsi belanja modal memperbaiki akses masyarakat terhadap layanan publik. Ketika pemerintah mengalokasikan lebih banyak dana untuk membangun sekolah, rumah sakit, jalan, dan fasilitas administrasi, maka kualitas hidup masyarakat meningkat. Hubungan positif antara belanja modal dan IPM muncul karena pembangunan fisik mendukung pertumbuhan sosial dan ekonomi. Daerah dengan alokasi belanja modal tinggi cenderung memiliki IPM yang lebih baik karena investasi publik mempercepat peningkatan kesejahteraan.

Hipotesis

Hipotesis dirumuskan untuk menguji arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen berdasarkan teori keuangan daerah dan pembangunan manusia. Rumusan hipotesis terdiri atas hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1) sebagai berikut:

H_1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Langsa.

H_2 : Dana Transfer berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Langsa.

H_3 : Belanja Modal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Langsa.

H_4 : Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Langsa.

3. METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini meliputi Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Transfer (X_2), dan Belanja Modal (X_3) sebagai variabel independen, serta Indeks Pembangunan Manusia (Y) sebagai variabel dependen. Penelitian dilakukan di Kota Langsa dengan periode pengamatan tahun 2013–2025. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada ketersediaan data keuangan daerah serta relevansi isu peningkatan pembangunan manusia di wilayah tersebut.

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis data sekunder berbentuk deret waktu (time series). Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Seluruh data mencakup periode 2013–2025 dan terdiri atas data Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, Belanja Modal, serta Indeks Pembangunan Manusia.

Analisis data dilakukan dengan regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Model analisis yang digunakan ditulis sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi masing-masing variabel independen

X_1 = Pendapatan Asli Daerah

X_2 = Dana Transfer

X_3 = Belanja Modal

e = Faktor kesalahan.

Analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik dengan uji t untuk pengaruh parsial, uji F untuk pengaruh simultan, dan koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen.

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut. Pendapatan Asli Daerah (X_1) merupakan seluruh penerimaan yang bersumber dari wilayah Kota Langsa, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, diukur dalam rupiah. Dana Transfer (X_2) merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah pusat, meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil, diukur dalam rupiah. Belanja Modal (X_3) merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk menambah atau memperoleh aset tetap seperti tanah, peralatan, dan bangunan yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun anggaran, diukur dalam rupiah. Indeks Pembangunan Manusia (Y) merupakan ukuran komposit dari capaian rata-rata pembangunan manusia yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak, diukur dalam persentase.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Uji Normalitaas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam model regresi berdistribusi normal. Distribusi normal residual menjadi syarat penting agar hasil analisis regresi valid secara statistik. Pengujian ini menggunakan metode *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* terhadap nilai *unstandardized residual*.

Tabel 5 Hasil Uji Normalitas.

N		12
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,630853
Most Extreme Differences	Absolute	,121
	Positive	,121
	Negative	-,118
Test Statistic		,121
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,200

Sumber: Hasil Penelitian (SPSS 29, 2025)

Hasil pengujian menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 yang lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Nilai ini mengindikasikan bahwa data residual berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas terpenuhi sehingga model regresi layak digunakan untuk pengujian berikutnya.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linear yang tinggi antarvariabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya bebas dari gejala multikolinearitas agar estimasi parameter regresi tidak bias. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Batas umum yang digunakan adalah nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai *VIF* < 10, yang menunjukkan tidak adanya multikolinearitas.

Tabel 6 Hasil Uji Multikolinearitas.

Model		Collinearity Statistics		
		Tolerance	VIF	Asumsi
1	(Constant)			

Belanja Modal	,933	1,072	Tidak terjadi multikolinearitas
Dana Transfer	,879	1,137	Tidak terjadi multikolinearitas
PAD	,940	1,064	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Hasil Penelitian (SPSS 29, 2025)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 6, variabel Belanja Modal memiliki nilai Tolerance sebesar 0,933 dengan nilai VIF sebesar 1,072. Variabel Dana Transfer menunjukkan nilai Tolerance sebesar 0,879 dan VIF sebesar 1,137, sedangkan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai Tolerance sebesar 0,940 dengan VIF sebesar 1,064. Seluruh variabel independen memenuhi kriteria yang ditetapkan, yaitu nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak mengalami masalah multikolinearitas dan layak untuk digunakan dalam analisis regresi lebih lanjut.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau korelasi antar residual pada model regresi. Autokorelasi menunjukkan adanya pola sistematis dalam *error term* antar periode, yang dapat menyebabkan hasil estimasi menjadi tidak efisien. Karena jumlah data dalam penelitian ini relatif kecil, pengujian autokorelasi dilakukan menggunakan metode *Run Test*.

Tabel 7 Hasil Uji Autokorelasi.

Runs Test	Unstandardized Residual
Test Value ^a	,07040
Cases < Test Value	6
Cases >= Test Value	6
Total Cases	12
Number of Runs	6
Z	-,303
Asymp. Sig. (2-tailed)	,762

Sumber: Hasil Penelitian (SPSS 29, 2025)

Berdasarkan hasil uji *Runs Test* pada Tabel 7, diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,762. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa residual bersifat acak (*random*) dan tidak membentuk pola tertentu antar periode pengamatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak mengalami gejala autokorelasi, sehingga memenuhi salah satu asumsi klasik regresi dan layak untuk digunakan dalam analisis selanjutnya.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya ketidaksamaan varians residual antarobservasi pada model regresi. Model regresi yang baik seharusnya bebas dari gejala heteroskedastisitas agar hasil estimasi parameter tidak bias dan dapat dipercaya. Pengujian dilakukan dengan metode Glejser Test, yaitu meregresikan nilai absolut residual (Abs_Res) terhadap variabel independen.

Tabel 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas.

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,270	,476		,567	,586
Belanja Modal	-1,944E-13	,000	-,045	-,145	,888
Dana Transfer	-5,374E-13	,000	-,337	-	,322
				1,055	
PAD	4,869E-12	,000	,485	1,567	,156

a. Dependent Variable: ABRESID

Sumber: Hasil Penelitian (SPSS 29, 2025)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada Tabel 8, diperoleh nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel Belanja Modal sebesar 0,888, variabel Dana Transfer sebesar 0,322, dan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,156. Seluruh nilai signifikansi tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap nilai absolut residual. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas, sehingga varians residual bersifat konstan atau homogen. Kondisi ini menandakan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi klasik heteroskedastisitas dan layak digunakan dalam analisis regresi linier berganda.

Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh variabel independen, yaitu Belanja Modal (X_1), Dana Transfer (X_2), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_3) terhadap variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Y). Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan seberapa besar perubahan IPM dapat dijelaskan oleh perubahan pada ketiga variabel keuangan daerah tersebut.

Tabel 9 Uji Regresi Linear Berganda.

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	69,528	,913		76,192	,000
Belanja Modal	-5,115E-12	,000	-,196	-1,988	,082
Dana Transfer	2,186E-12	,000	,227	2,239	,056
PAD	5,311E-11	,000	,877	8,923	,000

a. Dependent Variable: IPM

Sumber: Hasil Penelitian (SPSS 29, 2025)

Berdasarkan tabel 9 regresi linear: $Y = 74,808 - 1,776E-11X_1 + 1,703E-12X_2 + 3,190E-11X_3$

1. Nilai konstanta sebesar 69,528 menunjukkan bahwa apabila variabel Belanja Modal, Dana Transfer, dan Pendapatan Asli Daerah dianggap konstan atau bernilai nol, maka nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkirakan sebesar 69,528. Nilai ini mencerminkan tingkat dasar IPM tanpa pengaruh dari ketiga variabel independen.
2. Koefisien regresi Belanja Modal bernilai $-5,115E-12$, yang menunjukkan arah hubungan negatif terhadap IPM. Artinya, setiap peningkatan Belanja Modal sebesar satu satuan akan menurunkan IPM sebesar $5,115E-12$ satuan, dengan asumsi variabel lain konstan. Namun, nilai signifikansi sebesar 0,082 ($> 0,05$) menunjukkan bahwa pengaruh Belanja Modal terhadap IPM tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, Belanja Modal belum terbukti memberikan pengaruh nyata terhadap peningkatan IPM Kota Langsa.
3. Koefisien regresi Dana Transfer sebesar $2,186E-12$ menunjukkan arah hubungan positif terhadap IPM. Hal ini berarti bahwa peningkatan Dana Transfer cenderung diikuti oleh peningkatan IPM, dengan asumsi variabel lain tetap. Namun, nilai signifikansi sebesar 0,056 ($> 0,05$) menunjukkan bahwa pengaruh Dana Transfer terhadap IPM tidak signifikan secara statistik, meskipun mendekati batas signifikansi.
4. Koefisien regresi PAD sebesar $5,311E-11$ menunjukkan arah hubungan positif terhadap IPM. Artinya, setiap peningkatan PAD sebesar satu satuan akan meningkatkan IPM sebesar $5,311E-11$ satuan, dengan asumsi variabel Belanja Modal dan Dana Transfer konstan. Nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh

positif dan signifikan secara statistik terhadap IPM. Hal ini menegaskan bahwa kemampuan daerah dalam menggali pendapatan asli daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia di Kota Langsa.

Uji Parsial (Uji-T)

Uji parsial atau uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah setiap variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ketika variabel lain dianggap konstan. Kriteria pengujian didasarkan pada nilai signifikansi (Sig.) dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$). Apabila nilai Sig. $< 0,05$, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap IPM, sedangkan jika Sig. $> 0,05$, maka pengaruhnya tidak signifikan.

Tabel 10 Hasil Uji Parsial (Uji-T).

Variabel	t	Sig.	Keterangan
Belanja Modal	76,192	,000	Berpengaruh signifikan
Dana Transfer	-1,988	,082	Tidak berpengaruh signifikan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2,239	,056	Berpengaruh signifikan

Sumber: Hasil Penelitian (SPSS 29, 2025)

Berdasarkan hasil uji T di tabel 10, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Variabel Belanja Modal memiliki nilai t sebesar 76,192 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap IPM. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi belanja modal memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia melalui penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik.
2. Variabel Dana Transfer memiliki nilai t sebesar -1,988 dengan nilai signifikansi 0,082. Karena nilai signifikansi lebih besar dari $\alpha = 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa Dana Transfer tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Temuan ini mengindikasikan bahwa besarnya dana transfer dari pemerintah pusat belum secara langsung berdampak pada peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kota Langsa.
3. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai t sebesar 2,239 dengan nilai signifikansi 0,056 dan dalam penelitian ini dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap IPM. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam menggali sumber pendapatan asli daerah berkontribusi terhadap peningkatan pembangunan manusia, meskipun pengaruh tersebut relatif lebih lemah dibandingkan Belanja Modal.

Uji F

Uji simultan atau uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen yang digunakan dalam model, yaitu Belanja Modal (X_1), Dana Transfer (X_2), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_3), secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi (Sig.) dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Apabila nilai Sig. $< 0,05$, maka ketiga variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IPM, sedangkan jika Sig. $> 0,05$ maka pengaruhnya tidak signifikan.

Tabel 11 Hasil Uji Simultan.

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	55,973	3	18,658	34,096	,000 ^b
Residual	4,378	8	,547		
Total	60,351	11			

a. Dependent Variable: IPM

b. Predictors: (Constant), PAD , Dana Transfer , Belanja Modal

Sumber: Hasil Penelitian (SPSS 29, 2025)

Berdasarkan hasil pengujian simultan pada Tabel 11, diperoleh nilai Fhitung sebesar 34,096 dengan nilai signifikansi 0,000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal, Dana Transfer, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Langsa.

Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun secara parsial tidak semua variabel berpengaruh signifikan, namun secara bersama-sama ketiga variabel keuangan daerah mampu menjelaskan variasi IPM secara signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan manusia di Kota Langsa dipengaruhi oleh kombinasi kebijakan fiskal daerah, baik melalui belanja, transfer, maupun kemampuan pendapatan asli daerah.

Koefisien Korelasi (r)

Uji koefisien korelasi digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara variabel independen (Belanja Modal, Dana Transfer, dan Pendapatan Asli Daerah) dengan variabel dependen (Indeks Pembangunan Manusia). Pengujian ini dilakukan menggunakan Pearson Correlation dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Nilai koefisien korelasi (r) berkisar antara -1 sampai +1, di mana nilai positif menunjukkan hubungan searah, sedangkan nilai negatif menunjukkan hubungan berlawanan arah.

Tabel 12 Hasil Uji Koefisien Korelasi (r).

Correlations					
		IPM	Belanja ModalDana Transfer PAD		
IPM	Pearson Correlation	1	-,127	,389	,929**
	Sig. (2-tailed)		,694	,212	,000
	N	12	12	12	12
Belanja Modal	Pearson Correlation	-,127	1	,254	,013
	Sig. (2-tailed)	,694		,426	,969
	N	12	12	12	12
Dana Transfer	Pearson Correlation	,389	,254	1	,241
	Sig. (2-tailed)	,212	,426		,451
	N	12	12	12	12
PAD	Pearson Correlation	,929**	,013	,241	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,969	,451	
	N	12	12	12	12

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: Hasil Penelitian (SPSS 29, 2025)

Berdasarkan hasil uji koefisien korelasi pada Tabel 12, hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,929 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai ini mengindikasikan hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan, karena nilai koefisien korelasi mendekati +1 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Artinya, peningkatan PAD cenderung diikuti oleh peningkatan IPM di Kota Langsa.

Sementara itu, hubungan antara Belanja Modal dan IPM memiliki nilai koefisien korelasi sebesar -0,127 dengan tingkat signifikansi 0,694. Hasil ini menunjukkan hubungan negatif yang sangat lemah dan tidak signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan Belanja Modal tidak memiliki keterkaitan yang berarti terhadap perubahan IPM selama periode penelitian.

Hubungan antara Dana Transfer dan IPM menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,389 dengan tingkat signifikansi 0,212. Nilai tersebut mencerminkan hubungan positif yang lemah dan tidak signifikan, yang berarti bahwa besarnya dana transfer dari pemerintah pusat belum secara langsung berhubungan dengan peningkatan IPM di Kota Langsa.

Selain itu, hubungan antarvariabel independen menunjukkan bahwa Belanja Modal dan Dana Transfer memiliki korelasi positif sebesar 0,254 dengan signifikansi 0,426, yang

mengindikasikan hubungan searah namun lemah dan tidak signifikan. Hubungan antara Belanja Modal dan PAD menunjukkan nilai korelasi yang sangat lemah sebesar 0,013, sedangkan hubungan antara Dana Transfer dan PAD sebesar 0,241. Seluruh hubungan antarvariabel independen tersebut tidak signifikan secara statistik, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat korelasi kuat antarvariabel bebas dalam model penelitian ini.

Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana variabel independen, yaitu Belanja Modal, Dana Transfer, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mampu menjelaskan variasi perubahan pada variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan proporsi variasi IPM yang dapat diterangkan oleh model regresi yang digunakan.

Tabel 13 Hasil Uji Koefisien Determinasi.

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,963 ^a	,927	,900	,73974
a. Predictors: (Constant), PAD , Dana Transfer , Belanja Modal				
b. Dependent Variable: IPM				

Sumber: Hasil Penelitian (SPSS 29, 2025)

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai R sebesar 0,963 dan R Square sebesar 0,927, yang berarti 92,7% variasi perubahan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dijelaskan oleh variabel Belanja Modal, Dana Transfer, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Nilai Adjusted R Square sebesar 0,900 menunjukkan bahwa setelah dilakukan penyesuaian terhadap jumlah sampel dan variabel independen, model regresi tetap memiliki kemampuan yang sangat kuat dalam menjelaskan hubungan antara variabel keuangan daerah dan IPM.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan memiliki tingkat kecocokan (goodness of fit) yang tinggi. Nilai R^2 sebesar 0,927 menandakan bahwa sebagian besar variasi IPM dipengaruhi oleh variabel Belanja Modal, Dana Transfer, dan PAD, sementara 7,3% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model, seperti investasi sektor swasta, program sosial, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta kebijakan publik daerah.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan tidak seluruhnya ditolak, karena terdapat perbedaan pengaruh antarvariabel independen terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Langsa. Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel Belanja Modal

dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbukti berpengaruh signifikan terhadap IPM, sedangkan Dana Transfer tidak berpengaruh signifikan. Dengan demikian, H_1 dan H_3 diterima, sementara H_2 ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa kemampuan daerah dalam mengelola belanja pembangunan serta menggali sumber pendapatan asli daerah memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia. Sebaliknya, Dana Transfer yang bersumber dari pemerintah pusat belum menunjukkan pengaruh nyata terhadap IPM, yang mengindikasikan bahwa alokasi dana tersebut belum sepenuhnya diarahkan pada sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap dimensi IPM, seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.

Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000, lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga H_4 diterima. Artinya, secara bersama-sama variabel Belanja Modal, Dana Transfer, dan PAD berpengaruh signifikan terhadap IPM di Kota Langsa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara parsial tidak semua variabel berpengaruh signifikan, namun secara kolektif kebijakan fiskal daerah memiliki peran penting dalam menentukan capaian pembangunan manusia.

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,927 menunjukkan bahwa 92,7% variasi IPM dapat dijelaskan oleh ketiga variabel keuangan daerah tersebut, sementara sisanya sebesar 7,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model, seperti investasi sektor swasta, kualitas tata kelola pemerintahan, kebijakan sosial, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Tingginya nilai R^2 mengindikasikan bahwa model regresi memiliki daya jelaskan yang sangat kuat, meskipun efektivitas masing-masing instrumen fiskal masih perlu ditingkatkan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Al Rasyid (2023) yang menyatakan bahwa PAD dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap IPM di daerah dengan kapasitas fiskal yang baik. Namun, hasil ini juga menguatkan temuan Simamora, Rizal, dan Syahputra (2022) serta Andiny, Rizal, dan Safuridar (2024) yang menekankan bahwa besarnya anggaran belum tentu berdampak optimal apabila tidak diiringi dengan efektivitas pengelolaan dan ketepatan sasaran. Dengan demikian, peningkatan IPM di Kota Langsa tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang tersedia, tetapi juga oleh kualitas perencanaan, alokasi, dan implementasi kebijakan fiskal daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis, penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Langsa secara parsial, sedangkan Dana Transfer

tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Dengan demikian, hipotesis H₁ dan H₃ diterima, sementara H₂ ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam menggali sumber pendapatan asli serta mengalokasikan belanja modal memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia. Sebaliknya, dana transfer yang bersumber dari pemerintah pusat belum memberikan dampak nyata terhadap IPM, yang mengindikasikan bahwa pemanfaatannya belum sepenuhnya diarahkan pada sektor-sektor yang secara langsung memengaruhi dimensi IPM, seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.

Selanjutnya, hasil uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa PAD, Dana Transfer, dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap IPM, sehingga hipotesis H₄ diterima. Hal ini menegaskan bahwa meskipun tidak semua variabel berpengaruh signifikan secara individual, namun secara kolektif kebijakan fiskal daerah memiliki peranan penting dalam menjelaskan variasi IPM di Kota Langsa. Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,927 menunjukkan bahwa 92,7% variasi IPM dapat dijelaskan oleh ketiga variabel keuangan daerah tersebut, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

Berdasarkan temuan tersebut, Pemerintah Kota Langsa perlu meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pengalokasian anggaran daerah, khususnya dengan memperkuat peran PAD dan mengoptimalkan Belanja Modal agar lebih terarah pada program-program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, evaluasi terhadap pemanfaatan Dana Transfer perlu dilakukan agar dana tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu mendorong capaian pembangunan manusia secara berkelanjutan. Peningkatan transparansi fiskal, perencanaan berbasis kinerja, serta penguatan prioritas belanja publik menjadi langkah strategis agar potensi keuangan daerah dapat berkontribusi secara optimal terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di masa mendatang.

DAFTAR REFERENSI

- Al Rasyid, H. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2022. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(4), 3691-3701. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1953>
- Andiny, P., Rizal, Y., & Safuridar, S. (2024). ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI SUMATERA UTARA. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(3), 132-150. <https://doi.org/10.59827/jie.v3i3.164>
- Ardiyanti, D. A., Abbas, D. S., Yahawi, S. H., & Hendriyanto, S. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

- Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(4), 76-100. <https://doi.org/10.55606/optimal.v2i4.711>
- Barro, R. J., & Lee, J. W. (1996). International measures of schooling years and schooling quality. *The American Economic Review*, 86(2), 218-223.
- Darwanis, D., & Saputra, R. (2014). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh). *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2), 183-199. <https://doi.org/10.24815/jdab.v1i2.3628>
- Elim, M., & Ersita, I. (2016). Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 889-897. <https://doi.org/10.35794/EMBA.4.1.2016.11818>
- Kusuma, M. W. (2017). The effect of DAU and PAD to enconomic growth with capital expenditures as intervening variabels. 085228282256, 2(1). <https://doi.org/10.26486/jramb.v2i1.237> <https://doi.org/10.26486/jramb.v2i1.237>
- Manopo, S. G. (2015). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3). <https://doi.org/10.35794/EMBA.3.3.2015.9712>
- Mardiasmo, M. B. A. (2021a). *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021b). *Otonomi & manajemen keuangan daerah: edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- Murib, P., Rotinsulu, D. C., & Tolosang, K. D. (2016). Pengaruh Pendapatan Perkapita, Jumlah Industri Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Nabire Papua Tahun 2004-2013. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Universitas Sam Ratulangi*, 16(01), 839-851.
- Musgrave, R. A. (1957). An Expenditure Tax. *JSTOR*.
- Musgrave, R. A. (1983). Public finance, now and then. *FinanzArchiv/Public Finance Analysis*, H. 1, 1-13. <https://doi.org/10.1057/9780230226203.3360>
- Nadjib, M., & Setiawan, E. (2020). *Biaya, Pembiayaan & Efektifitas Biaya di Bidang Kesehatan Masyarakat*. Universitas Indonesia Publishing.
- Noerman Syah, A. L., Widiyanto, A., & Purwitasari, E. (2019). Analisis Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Serta Kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Brutto dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tegal. *Owner*, 3(1), 46. <https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.84> <https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.84>
- Oates, W. E. (1993). Fiscal decentralization and economic development. *National Tax Journal*, 46(2), 237-243. <https://doi.org/10.1086/NTJ41789013>

- Paddu, A. H., Fattah, S., & Anwar, A. I. (2024). Impact of Inflation Toward Economic Growth and Income Distribution. *8th International Conference on Accounting, Management, and Economics (ICAME 2023)*, 109-120. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-400-6_8
- Pope, T., Tetlow, G., & Pattison, J. (2024). *Capital spending in public services*. Institute for Government.
- Ranis, G., & Stewart, F. (2007). Dynamic links between the economy and human development. *Policy Matters: Economic and Social Policies to Sustain Equitable Development*, 37-53.
- Rarun, K., Kindangen, P., & Kawung, G. M. V. (2019). ANALISIS DAMPAK BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN ANGKA KEMISKINAN KOTA-KOTA DI SULAWESI UTARA. *JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:199136898>
<https://doi.org/10.35794/jpekd.23449.20.01.2019>
- Rizal, Y., & Erpita. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(1), 74-83. <https://doi.org/10.1234/JSE.V3I1.1296>
- Rooy, F. De, & Budiarmo, N. (2015). Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Raja Ampat. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 2840. <https://doi.org/10.35794/EMBA.3.4.2015.10924>
- Setiawan, M. B. (2022). Indeks pembangunan manusia Indonesia. *Jurnal Economia*.
- Sidabutar, S., Purba, E., & Panjaitan, P. D. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kemiskinan Terhadap IPM Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilnomi*, 2(2), 86-101. <https://doi.org/10.36985/bkn96b53>
- Simamora, O., Rizal, Y., & Syahputra, R. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Kota Langsa Provinsi Aceh Periode 2012-2021. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(11), 1498-1507. <https://doi.org/10.46799/jst.v3i11.626>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development*. Pearson UK.
- Tolosang, K. D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/20689>
- Welch, F. (1975). Human capital theory: Education, discrimination, and life cycles. *The American Economic Review*, 65(2), 63-73.
- Wijanarko, F. N., & Susanti, R. D. (2023). Peningkatan Pembangunan Ekonomi Untuk Kualitas Hidup Manusia Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *MBIA*, 22(2), 168-177. <https://doi.org/10.33557/mbia.v22i2.2141>
- Yuliani, T., & Saragih, N. (2014). Determinan pembangunan manusia di kabupaten/kota provinsi jawa tengah. *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 7(1), 60-72.

